



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA

TEMPAT : RUANG RAPAT LANTAI 4 , GEDUNG KEMENKO BID PEREKONOMIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.7, JAKARTA PUSAT.
HARI DAN TANGGAL : Selasa, 03 Oktober 2017
WAKTU : JAM 13.30 - SELESAI
AGENDA : PEMBAHASAN *PENYELESAIAN LAPORAN EITI 2015* (LAPORAN FINAL
INCEPTION REPORT) dan PEMBAHASAN DRAFT FINAL LAPORAN
TRANSPARANSI *COMMODITY TRADING*
PESERTA YANG HADIR :

Ditjen Perimbangan Keuangan	Irwan H Sitorus
SKK Migas	Runi Nariswari
	Sondang
	Musfadillah Daulay
Ditjen Pajak	Ahmad Zaky Zamani
Ditjen Perbendaharaan	Adijanto
	Sigit H
	Teguh Subarkah
	Mursyid
	Eko Kuswanto
Ditjen Anggaran	Seprina Hasan E
	Faisal J.A
Sekretariat EITI Internasional	Gay Orlenes
World Bank	Nat Adams
Konsultan Commodity Trading	Johnny West – Open Oil
Deputi I Ekoda Kemenko	Tesi Triani
Dinas ESDM Provinsi Riau	Abdi Syahril
Konsultan IA KAP Heliantono	Ade Ikhwan
	Asrini Wiranti
	Dessi
	Ahmad Zamroni
	Vega
	Gemi Ruwanti
	Einstein
PWYP	Maryati Abdulah
Pertamina	Anizar Burlian
	Anita ND
	M. Idris
	Nyoman Soeta
	Hayyik Lana R
	Rahayu S Hadiputra

Asosiasi APBI
Sekretariat EITI & Kemenko
Perekonomian

Hendra Sinadia
Ahmad Bastian Halim
Agus Haryanto
Novianti
Syaiful Mujab
Edi Effendi T
Ronald T
Agus Prasetiono
Agus Trianto
Doni E
Venta A
A.Hadian
Anggi G
Astari M
Eka W
Arief

A. PEMBUKAAN

- Rapat tim teknis dipimpin oleh bapak Ahmad Bastian selaku *Asisten Deputi Industri Ekstraktif*, dengan menyampaikan point-point agenda pembahasan sebagai berikut :
 - Pembahasan *Draft Final Inception Report EITI 2015*
 - Pembahasan *Draft Final Transparansi Commodity Trading*

B. PEMAPARAN

1. **Laporan Inception Report EITI 2015**, oleh Bpk Ade Ikwan dan Ibu Dessi, selaku Konsultan IA, dalam pemaparan draft inception report disampaikan point-point sebagai berikut :
 - Pendahuluan
 - Tata Kelola Industri Ekstraktif
 - Amanat Konstitusi Undang – Undang 1945
 - Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia
 - Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif
 - Tantangan dan Isu Terkini Terkait Industri Ekstraktif
 - Perizinan dan Kontrak
 - Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif
 - Proses Penetapan dan Tender Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
 - Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba
 - Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif
 - Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia
 - Industri Ekstraktif di Indonesia dalam Konteks Global
 - Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia
 - Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia
 - Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba
 - Produksi Migas dan Minerba
 - Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba(Draft Inception Report Terlampir)

2. Pemaparan Pilot *Commodity Trading*, Oleh, Johnny West, Konsultan Open Oil

- Di awal paparannya konsultan menyampaikan bahwa meskipun requirements dalam Standard EITI tidak mensyaratkan ruang lingkup Laporan *Commodity Trading* termasuk informasi impor, namun dalam konteks Indonesia sebagai negara net importir minyak, impor seharusnya masuk ruang lingkup laporan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan untuk memasukkan impor dalam ruang lingkup laporan yaitu:
 - Sebagai negara net importir minyak bumi, volume dan nilai ekspor minyak bumi Indonesia saat ini tidak signifikan;
 - Untuk memulihkan citra Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara, dimasa yang lalu praktek impor minyak bumi yang dilakukan Pertamina lalu sering dicurigai negatif oleh berbagai kalangan di masyarakat.
- Hal lain yang disarankan konsultan untuk dimasukkan dalam laporan adalah informasi detail tentang ekspor dan entitas pembeli (importer) mengingat nilainya yang cukup besar (materiality)
- Time line proses penyelesaian laporan yaitu :
 - tanggal 31 Oktober 2017 *deadline* pelaporan,
 - bulan November review laporan dari SKK Migas dan Pertamina, dan
 - Publikasi laporan pada bulan Desember 2017.

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Point-point mengenai pembahasan, tanggapan dan masukan dari para peserta rapat tim teknis, terangkum sebagai berikut :

1. Pembahasan Laporan Inception Report EITI 2015

- Tanggapan Pak Bastian (Asdep Industri Ekstraktif) :
 - Perlu diperhatikan kelengkapan administrasi atas proses pencairan invoice IA
 - Mohon masukannya dari Tim Pelaksana terkait dengan paparan dari IA, apakah seluruh masukan dari ratimlak yang lalu sudah diakomodir kedalam laporan
 - Terkait dengan data terutama Minerba, mungkin APBI dapat membantu terkait data PKP2B
 - Koordinasikan dengan tim sekretariat apabila menemui kendala
- Tanggapan Ibu Maryati - CSO PWPY :
Menanyakan tentang hambatan dan upaya penyelesaian agar laporan dapat sesuai dengan scooping dan standard EITI :
 - Beneficial ownership bisa dipakai dengan model kerjasama dengan AHU kementerian Depkumham.
 - Mengenai kadaster informasi dapat menggunakan One Map ESDM. Itu merupakan upaya dan terobosan yang dilakukan agar laporan tahun 2015 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk transparansinya agar lebih ditingkatkan.
 - Kementerian ESDM sudah meluncurkan aplikasi untuk memantau produksi yang dapat melihat lifting bahkan pertiga bulan kebelakang namun untuk batubara belum bisa.
 - Keterbukaan informasi dan transparansi yang berbasis pada data dapat membantu kementerian dalam menentukan kebijakan kebijakan politis dan public.
- Tanggapan Pak Zaki – Ditjen Pajak :
Informasi Untuk minerba sudah ada datanya, untuk Migas dari total 69 ada 49 sudah teridentifikasi tapi belum berani buka karena belum ada lembar otorisasi. Dari 49 perusahaan masih 27 yang dicari terkait pembayarannya. Dalam kesempatan ini IA mohon segera menyampaikan LO tersebut.

- Tanggapan Bpk Seprina Hasan – Ditjen Anggaran :
Progress nya masih mengumpulkan data yang disampaikan dari IA. Ada beberapa masukan terutama Deviden. Dari 4 BUMN yang diwajibkan melapor belum seluruhnya diterima. Formulir sudah dikoreksi oleh IA dan sudah disampaikan ke Anggaran
- Tanggapan Pak Hendra – Asosiasi APBI :
 - Untuk melengkapi data yang agak sulit karena data di APBI terbatas kalau dilihat jumlah perusahaan hanya kurang dari 90 Perusahaan. Jika masih ada perusahaan yang pending data atau perusahaan yang belum respon mohon dapat disampaikan.
 - Usulan ruang lingkup mengenai RPP perpajakan sector pertambangan mungkin Sekretariat atau Kemenko bisa mendatangi Kemenkeu.
 - Untuk mengetahui penerimaan Negara dari sector pertambangan terkait dengan konversi IUP, KK dan IUPK dan mungkin PKP2B menjadi IUPK, perlu dilihat lebih jelas dari draft RPP karena dampaknya sangat signifikan bagi penerimaan Negara.
- Tanggapan Pak Bastian :
Usulan dari Pak Hendra sangat baik dan memang sudah ada 2 peraturan yang sedang disiapkan yaitu mengenai RPP fiscal Minerba terkait perubahan status dari Kontrak Karya Menjadi IUPK atau dari PKP2B menjadi IUPK, semoga bisa diakomodir.
- Tanggapan Bu Runi - SKK Migas :
Berdasarkan inventarisir ada 2 perusahaan yang sudah pailit yaitu Selat panjang dan Blok Kampar. EMP Group sedang ada masalah internal perusahaan sehingga akan terlambat menyampaikan laporannya
Operator Blok Kampar pada tahun 2015 adalah Medco, sementara sekarang adalah PHE sehingga ada sedikit kesulitan untuk meminta data-data, karena data-data tahun 2015 tersebut ada di Operator lama namun SKK sedang berkoordinasi dengan Medco
- Tanggapan Bu Dessi – Konsultan IA :
Menanggapi usulan-usulan rapat sebelumnya yang sudah diakomodir di dalam inception report
 1. Tanggapan atas CSO mengenai keterbukaan informasi public, terkait informasi kadastral, Beneficial Ownership dan produksi : Untuk MoMi akan IA bahas pada Laporan yaitu informasi-informasi apa saja dan siapa saja yang bisa diakses di MOMI. Karena tidak semua informasi bisa diakses dan MOMI hal ini menjadi permasalahan karena hal tersebut belum bisa diakses secara terbuka oleh public. Namun EITI standard mengharuskan hal tersebut dapat diakses oleh public.
 2. Beneficial ownership dalam EITI Standard masih disarankan dan karena Indonesia sudah memiliki Beneficial Ownership Roadmap hal tersebut yang akan IA diskusikan di laporan sampai dimana progress nya karena berdasarkan roadmap tahun 2017 sudah ada definisi Beneficial Ownership dari perspektif Indonesia. Kemungkinan minggu depan akan ada Beneficial Ownership Conference
 3. Data produksi :
 - akan lebih baik jika ada data yang real dari SKK Migas langsung update setiap saat
 - Untuk volume produksi Migas maupun Minerba sudah ada namun yang belum ada adalah nilainya. Untuk hal tersebut akan IA tanyakan langsung kepada Ditjen Minerba dan Ditjen Migas
 4. RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) pertambangan akan sangat baik jika dimasukkan dalam laporan namun IA butuh bantuan dari Tim Pelaksana untuk dapat memberikan informasi atau draftnya yang bisa IA bahas di Laporan (Terkait dengan draft RPP masih bersifat rahasia sehingga belum bisa diberikan)
- Tanggapan Pak Ade – Konsultan IA :

LO (Letter of Authorization) akan IA sampaikan dalam 1-2 hari kedepan baik untuk perusahaan Minerba maupun Migas. Akan segera kami kirimkan rekapannya dalam hardcopy maupun softcopy nya. Mengenai tanggapan dari SKK Migas bahwa Medco benar belum menyampaikan laporannya dan EMP dan Vico sudah telp ke Vico BP sudah pull out dr Sanga-Sanga dan PI ganti ke Saka.

- Tanggapan Bapak Teguh - Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Ditjen Perben) :
Terkait dengan laporan, hal tersebut merupakan kebutuhan. Form yang dikirimkan jika dilihat secara kewenangan seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi, penyetoran Kas Negara dapat diakses melalui 2 cara yaitu :
 - system penerimaan Negara (Module penerimaan Negara) penyetorannya melalui Bank Persepsi. System ini dioperasikan dengan bekerjasama antara Bank dengan Kemenkeu, penata usahanya ada di KPPN Khusus Penerimaan.
 - Yang kedua adalah melalui rekening Kas Umum Negara yang dikelola oleh Direktorat PKN yang disetorkan langsung ke BI. Peran dari setoran langsung ke KUN ini kami kurang karena ada kelemahan atau kendala tersendiri dalam mengidentifikasi kas Negara.Dengan adanya Module Penerimaan Negara ini seluruh transaksi penerimaan Negara diawali dengan rekaman identitas setoran melalui system billing dengan penginputan elemen-elemen data pada system billing tersebut akan memudahkan dalam melihat berapa yang disetor, dari mana, dan untuk periode apa setoran tersebut. Hal tersebut bisa dilihat disistem settlement yang dikelola oleh KPPN khusus dan diberikan identitas khusus berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Namun setoran yang dilakukan langsung ke Bank Indonesia karena secara fungsi Bank Indonesia bukanlah Bank yang menata usaha untuk Penerimaan Negara, disana hanya punya rekening tetapi si penyetor mentransfer dana dalam rangka memasukan uang ke Negara sebagai transaksi penyetoran. Ada keterbatasan karena tidak disertai elemen-elemen data atau identitas dalam rekening tersebut karena hanya masuk dalam rekening Koran saja. Semaksimal mungkin setoran yang bersumber dari Minerba bisa diarahkan melalui Module Penerimaan Negara generasi II. Module Penerimaan Negara generasi II secara full implementasinya pada 2017. Mulai tahun 2014 sejak MPN diimplementasikan masih ada system lain yaitu MPN generasi I yang tidak menggunakan system billing artinya masih menggunakan hardcopy SSP. Maka dengan system billing 2017 ini dipastikan bahwa seluruh transaksi penerimaan Negara bisa diidentifikasi secara mudah dan akan lebih mudah disupply KPPN khusus pada saat penyusunan laporan secara real time.
- Tanggapan Bu Maryati - CSO :
Apakah MPN tersebut dapat digunakan internal pemerintah dalam mengecek transaksi. Dan apakah jika IA ada kesulitan mengakses laporan per entities akan bisa melihat data di MPN yang dibutuhkan sesuai dengan laporan yang ada ?
Sebagai Tim Transparansi Perpres penerimaan Negara, seperti usulan dari Pak Hendra untuk mendiskusikan mengenai draft kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan Negara pada forum ini karena ada banyak interes persoalan draft dan lain sebagainya
- Tanggapan Pak Hendra - APBI :
Ada beberapa pertanyaan dari media mengenai RPP karena ada sedikit bocoran bahwa ini berlaku untuk Mineral. Mereka menanyakan bagaimana dengan PKP2B? Jawaban : Pada dasarnya PKP2B membutuhkan PP tersebut Karena di UU Minerba ada yang 10% tambahan pungutan pajak bagi pemegang IUPK. Seperti Freport, tarif pajak adalah 25% namun ada tambahan 10% yang diperlakukan sebagai PPh. Hal ini masih kurang jelas mengenai pungutan 10% tersebut, dalam UU Minerba apakah masuk PPh ? Hal ini masih ditelusuri lebih lanjut
- Tanggapan Pak Bastian – Asdep IE :
mengenai hal yang disampaikan Pak Hendra dan Bu Maryati memang hal ini (RPP) masih bersifat rahasia karena diantara pemerintah sendiri belum ada kesepakatan, namun rencana tersebut

mencakup mineral dan batubara, mengenai nilai nya tidak bisa disebutkan. Hal ini berlaku jika ada perubahan dari Kontrak Karya menjadi IUPK. Namun hal tersebut masih ditelaah lagi.

- **Tanggapan Bpk Teguh - Ditjen Perben :**
Menanggapi pernyataan Bu Maryati atas NPN generasi 2 keunggulan nya adalah jika untuk konfirmasi sepanjang jelas utk yg diminta misalnya setoran royalty atau iuran tetap pertambangan dalam mata uang IDR atau Dollar dsb dapat diidentifikasi dari kode billing nya. Akan diberikan konfirmasi oleh KPPN khusus Penerimaan Negara secara realtime seluruh transaksi bisa diidentifikasi. KPPN Khusus Penerimaan Negara ini mencatat seluruh transaksi penerimaan yang dilakukan oleh sekitar 80 Bank Persepsi yang terikat kerjasama dengan Dirjen Perbendaharaan. Misalnya SKK Migas meminta konfirmasi atas setoran penerimaan Negara dalam periode tertentu dapat dibantu oleh KPPN Khusus Penerimaan Negara. Kesulitan dimasa yang lalu adalah system yang berbeda (MPN I dan setoran melalui BI) dan database tidak dalam satu tempat, khususnya yang transaksi melalui penyetoran kas umum Negara identitas perusahaan tersebut tidak cukup karena setiap penyetoran harus menyebutkan kode akun (adalah satu alokasi pencatatan dalam pembukuan akuntansi pemerintah untuk penerimaan tertentu), misalnya iuran tetap pertambangan minerba diakun 421 311 ini merupakan digit yang sudah dialokasikan secara khusus untuk iuran tetap, kemudian yang royalty 421 312. Jadi KPPN penerimaan Negara ini tinggal narik data apa yang dibutuhkan
- **Tanggapan Bpk Irwan – Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) :**
Terkait dampak industri ekstraktif mengenai Bagi Hasil. Pertanyaan dari Pemda mengenai DBH yang turun dianggap tidak transparansi. Pemda sangat ingin dilibatkan dalam perhitungan mulai dari data dasar perhitungan, penetapan daerah penghasil oleh Menteri ESDM termasuk dalam perhitungan DBH, perhitungan cost recovery, dan komponen pengurangnya sehingga akhirnya menjadi PNBP per daerah untuk dihitung oleh DJPK menjadi DBH. Usulannya terkait hal ini adalah porsi DBH dalam laporan mendapatkan porsi yang layak dan diulas lebih dalam, tidak hanya dimasukan dalam industri ekstraktif terhadap kehidupan social masyarakat. Hal ini agar dapat dielaborasi tidak hanya dalam sisi jumlahnya saja. Diharapkan pelaporan ini ada penjelasan dampak dari adanya DBH dan dapat berguna bagi Pemda
- **Tanggapan Pak Edi – Sekretariat EITI :**
Hal yang disampaikan DJPK terkait dengan pernyataan Pemda merupakan hal yang sudah sering disampaikan juga oleh Pemda dan akan dibicarakan dengan tim teknis agar hal yang akan disampaikan bisa satu suara.
Selain pada itu Pak Edi juga menyampaikan hal-hal sbb :
 - Mohon bantuan kepada SKK utk follow up bagi perusahaan yang belum lapor.
 - Tim IA dan Sekretariat akan visit ke Minerba untuk meminta informasi dikarenakan masih ada perusahaan yang belum lapor dan mohon agar IA untuk dapat memaksimalkan database yang ada.
 - Meminta tim IA untuk menaati Jadwal yang sudah disepakati bersama, seperti antara lain :
 - 10 November 2017 akan disepakati draft report. Diharapkan seminggu sebelumnya IA sudah menyelesaikan laporannya.
 - 30 November akan membahas dan menyetujui final report, jika MSG sepakat, namun jika tidak, akan dicatat sebagai catatan yang harus diperbaiki oleh IA. Setelah laporan diperbaiki akan ada rapat MSG tgl 7 Desember 2017. Namun jika pada tanggal 30 November “sepakat tidak ada catatan” atau “sepakat dengan catatan” hal tersebut akan diakomodir oleh IA sehingga rapat pada tanggal 7 Desember tidak perlu diadakan. Namun jika rapat tersebut perlu diakan maka hal tersebut akan diakomodir oleh IA.
 - 14 Desember 2017 diharapkan laporan final sudah selesai dan laporan akan segera di upload sekitar tanggal 20 Desember sebelum Natal sesuai dengan persyaratan.

2. Pembahasan Pilot *Commodity Trading*

Tanggapan atas paparan Pilot Commodity Trading Adalah dari SKK Migas, Pertamina, Maryati Abdullah dari PWYP serta Gay Ordenes dari Sekretariat EITI Internasional yaitu:

- Perwakilan SKK menyampaikan bahwa SKK Migas tidak melakukan penjualan minyak bumi bagian pemerintah sehingga tidak dalam posisi dapat memberikan tanggapan atas usulan untuk memasukkan aspek impor minyak bumi dalam ruang lingkup laporan.
- Perwakilan dari Pertamina menyampaikan bahwa informasi data ekspor minyak dari Pertamina sudah ada dan selalu disampaikan kepada institusi pengawas seperti BPK dan BPKP sehingga bisa dimasukkan dalam lingkup Laporan *Pilot Commodity Trading*. Namun mengenai informasi impor minyak yang dilakukan Pertamina karena ada kaitannya dengan aspek kerahasiaan persaingan bisnisdengan perusahaan lain, masih harus dikonsultasikan lebih dahulu dengan pimpinan yang berwenang di Pertamina.
- Maryati Abdullah dari PWYP menyampaikan sangat setuju aspek impor minyak masuk dalam ruang lingkup Laporan *Pilot Commodity Trading*. Dengan telah dibubarkannya Petral dan perannya telah diganti oleh *Integrated Supply Chain* (ISC) Pertamina, maka keterbukaan informasi data impor minyak yang dilakukan oleh Pertamina menjadi sangat relevan dan penting bagi publik.
- Gay Ordenes dari Sekretariat EITI Internasional menyampaikan bahwa Laporan *Pilot Commodity Trading* ini adalah salah satu topik yang akan divalidasi oleh Validator Internasional atas pelaksanaan EITI Indonesia pada tahun 2018 yang akan datang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Rapat Menyetujui Laporan Inception Report EITI 2015 termasuk jadwal tahapan penyelesaian Laporan EITI 2015 yang telah dipaparkan oleh Konsultan Independent Administrator (IA)
2. IA diminta untuk mengusahakan agar perusahaan dan instansi pemerintah/lembaga yang belum menyampaikan laporannya khususnya perusahaan minerba untuk dapat segera menyampaikan laporan EITI 2015.
3. Masukan dan saran dari anggota tim pelaksana (DJPK) untuk pembahasan lebih lanjut mengenai keterlibatan daerah dalam proses penentuan dan perhitungan DBH akan dibahas dalam rapat tim teknis.
4. Berkaitan dengan ruang lingkup laporan Transparansi *Commodity Trading*, maka Johnny West (open oil), selaku Konsultan penyusunan laporan Transparansi Commodity Trading diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan Pertamina untuk mendapatkan kepastian mengenai apakah lingkup Laporan *Pilot Commodity Trading* dapat meliputi aspek *impor minyak* yang dilakukan oleh Pertamina. Pertemuan juga akan dilakukan dengan pimpinan SKK Migas.

**Asisten Deputi Industri Ekstraktif,
Selaku Sekretaris Tim Transparansi
Industri Ekstraktif**

Ahmad Bastian Halim